

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Angka	3,754	3,754	3,754	3,754	3,754	INSPEKTUR DAERAH	1. Terjadinya mutasi pejabat pengampu SAKIP di perangkat daerah belum diikuti dengan pengembangan pejabat baru pengganti terhadap pengelolaan SAKIP. 2. Keterlambatan terbitnya Surat Edaran tentang Penyusunan Laporan Kinerja, sehingga Perangkat Daerah 3. Surat Edaran untuk penyusunan Laporan Kinerja terbit di awal tahun berikutnya yang biasanya penyusunan Laporan Kinerja sudah mulai di akhir tahun anggaran sehingga jika ada perubahan menyebabkan adanya perubahan atas Laporan Kinerja yang sudah mulai disusun.	1. Adanya pedoman penyusunan Laporan Kinerja untuk keseragaman sistematika dan variabel pendukung yang perlu dilaporkan oleh perangkat daerah sebagai pendukung penilaian SAKIP. 2. Adanya sosialisasi oleh Evaluator SAKIP dari Kemenpan RB sebagai pengayaan dan pencerahan bagi perangkat daerah dalam pengelolaan SAKIP.
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	15,99	8,2	15,99	15,99	15,99	INSPEKTUR DAERAH	1. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan namun masih terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target yang sudah diperjanjikan. 2. Evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah dilakukan setiap triwulan. Hasil evaluasi berupa rekomendasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada PPTK dan sudah ditindaklanjuti, namun evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum dilaksanakan tepat waktu.	1. Adanya komitmen dari pimpinan. 2. Peningkatan kualitas pemahaman pegawai terhadap SAKIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	86,22	82	86,22	86,22	86,22	INSPEKTUR DAERAH	<p>1) Rencana pelatihan/pengembangan diklat belum didasarkan pada analisis gap kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan.</p> <p>2) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum diintegrasikan dengan profil risiko Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan (Enterprise Risk Management/ERM).</p> <p>3) Belum ada pedoman audit ketaatan yang disusun sesuai current issue.</p> <p>4) Pendokumentasian atas kegiatan evaluasi berkelanjutan belum optimal.</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan</p> <p>2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pengawasan terhadap hasil pemeriksaan dan cara menindaklanjutinya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>3. Pemilihan jenis pelatihan yang tepat guna meningkatkan mutu hasil pengawasan</p>
		Kapabilitas APIP	Angka	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	INSPEKTUR DAERAH	<p>1. Kurangnya Komitmen: Jika pimpinan atau pegawai tidak memiliki komitmen terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pelaksanaannya cenderung tidak efektif.</p> <p>2. SDM yang Kurang Memadai: Keterbatasan jumlah atau rendahnya kualitas SDM yang menangani awareness mengenai pentingnya tindak lanjut serta cara pelaksanaannya dapat menjadi penghambat.</p> <p>3. Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjut sering kali membuat proses menjadi lambat dan tidak efektif.</p> <p>4. Ketidapahaman terhadap Rekomendasi: Tidak semua pihak memahami dengan baik rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dapat menyebabkan tidak dilakukannya tindak lanjut dengan tepat.</p> <p>5. Resistance terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menghambat proses perbaikan.</p> <p>6. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu membuat proses tindak lanjut membutuhkan waktu yang lama</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan: Dukungan dan komitmen dari pimpinan Instansi sangat penting. Pimpinan yang peduli dan aktif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan akan mendorong pegawai untuk melaksanakan rekoemndasi dengan baik;</p> <p>2. Sistem pengawasan internal yang baik : Adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dapat membantu memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara konsisten.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pemahaman terhadap hasil pemeriksaan dan cara menindaklanjutinya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>4. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta prosedur yang jelas, membuat proses menjadi lebih terarah dan terukur.</p> <p>5. Sistem Informasi yang Memadai: Penggunaan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi terkait hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas monitoring.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	97%	25%	97%	97%	97%	INSPEKTUR DAERAH	<p>1) Pihak terkait (Perusahaan/ personal) dengan temuan sudah meninggal, pensiun, atau tidak diketahui alamatnya</p> <p>2) Dokumen-dokumen terkait sulit ditemukan atau hilang</p> <p>3) Komunikasi antara pemeriksa dan auditee kurang baik</p> <p>4) Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>5) Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi</p> <p>6) Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.</p>	<p>1) Adanya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan auditee</p> <p>2) Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM</p> <p>3) Adanya pemantauan dan pendampingan terhadap tindak lanjut temuan</p>

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (urusan Pengawasan Reformasi Birokrasi)	Persen	72,5	63	66	69	72,5	IRBANWAS RB		
	a. Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat	Persen	16,67	0	0	16,67	16,67	IRBANWAS RB		
	1) Meningkatkan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	25	6	12	18	25	IRBANWAS RB	Kurangnya kesadaran OPD dalam mengisi realisasi renaksi tepat waktu.	Komitmen dan motivasi dari Koordinator RB pada OPD untuk peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
	2) Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	4	8	12	16	IRBANWAS RB	- Beberapa OPD tidak memahami terkait data dukung area MCP. - Sosialisasi anti korupsi masih bergantung pada Inspektorat - UPG Pembantu belum menjalankan fungsinya secara optimal. - UPG membantu belum menyampaikan laporan Gratifikasi secara berkala	Komitmen pimpinan dalam upaya memberikan wawasan terkait anti korupsi kepada seluruh pegawai
	3) Meningkatkan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	30	7	15	22	30	IRBANWAS RB	- Kualitas paparan OPD dalam rangka evaluasi tahap wawancara masih kurang (belum sesuai dengan ketentuan) - Pemahaman terkait Pembangunan ZI belum merata di seluruh OPD	- Telah diraihnya predikat WBK pada 3 OPD di Kota Magelang - Komitmen pimpinan dan jajaran dalam Pembangunan ZI

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



**LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

IRBANWAS RB



**ENY KUSUMADEWI, S.E., M.M.**  
Pembina Tk I  
NIP. 19761027 199603 2 002

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Pengawasan Khusus)	Persen	94,5	25	50	75	94,5	IRBANWAS KHUSUS		
	a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	Persen	95	95	95	95	95	IRBANWAS KHUSUS		
	1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Laporan	25	2	9	22	25	IRBANWAS KHUSUS	1. Memperoleh data dan informasi terkadang menemui kesulitan karena dimungkinkan obrik menutupi kondisi yang senyatanya (tidak kooperatif); 2. Pemeriksa internal mempunyai kewenangan yang terbatas kepada pihak-pihak diluar pemkot; 3. Belum sepenuhnya Pemeriksa memiliki kompetensi Inventigasi	1. Adanya kepercayaan dari mitra kerja pengawasan terhadap Inspektorat untuk menangani pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pemeriksaan khusus' 2. Adanya fasilitasi kerjasama antara APIP-APH sehingga memudahkan koordinasi;
	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (urusan Pengawasan Reformasi Birokrasi)	Persen	72,5	63	66	69	72,5	IRBANWAS KHUSUS		
	a. Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya meningkat	Persen	16,67	0	0	16,67	16,67	IRBANWAS KHUSUS		
	1) Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	10	0	5	7	10	IRBANWAS KHUSUS	1. Terkait Pendampingan Hukum dan Fasilitasi pendampingan, ditemukan kendala dalam menyamakan persepsi antara APIP, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak terkait lainnya karena masing masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda; 2. Dalam pelaksanaan kegiatan Saber Pungli, sering tidak sesuai dengan renaksi yang telah ditetapkan karena terkendala dengan jadwal masing-masing Instansi terkait.	1. Semua Instansi terkait telah membangun komitmen bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama; 2. Sudah terbentuk sekretariat Satgas Saber Pungli.

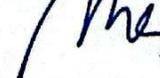
Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

Pt. IRBANWAS KHUSUS



INDA SRI PALUPI, SH. M.AP  
Pembina  
NIP. 19730813 199803 2 005

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	94,5	25	50	75	94,5	IRBANWAS PPD		
	a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	96	25	50	75	96	IRBANWAS PPD		
	1) Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	24	0	24	24	24	IRBANWAS PPD	Data dukung OPD tidak lengkap dan tidak benar , adanya mutasi pejabat yang tidak berkompeten	Meningkatnya uji kompetensi pejabat fungsional
	2) Meningkatnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	25	5	10	25	25	IRBANWAS PPD	Jadwal reviu /pemeriksaan/evaluasi yang merupakan mandatory yang berbarengan dari awal tahun sampai dengan semester satu . Ditambah adanya permohonan reviu insidental OPD yang insidental dan tidak terjadwal	Meningkatnya uji kompetensi pejabat fungsional
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (Urusan Pemerintahan Daerah)	Persen	72,5	63	66	69	72,5	IRBANWAS PPD		
	a. Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memanfaatkan hasil money	Persen	25	25	25	25	25	IRBANWAS PPD		
	1) Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	11	11	11	11	28	IRBANWAS PPD	Adanya regulasi pemerintah yang selalu berganti .	Adanya koordinasi positif dengan OPD mitra kerja

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



**LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

IRBANWAS PPD



**TUTIK DAMAYANTI, S.E.**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19710403 199803 2 010

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (Urusan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja)	Persen	94,5	25	50	75	94,5	IRBANWAS AKK		
	a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (Urusan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja)	Persen	96	25	50	75	96	IRBANWAS AKK		
	1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	0	3	7	10	IRBANWAS AKK	Waktu permohonan kegiatan mandatori tidak sesuai jadwal, keterbatasan SDM karena audit kinerja memerlukan waktu yang panjang dan beberapa tahapan	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan persyaratan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota
	2) Meningkatkan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	7	2	3	5	7	IRBANWAS AKK	Hambatan: Terdapat kegiatan mandatory yang harus dilaksanakan.	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan persyaratan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota
	3) Meningkatkan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	29	5	15	20	29	IRBANWAS AKK	Kegiatan terkonsentrasi pada kegiatan mandatori, yang pengusulannya tidak serentak, sehingga kegiatan pengawasan di luar mandatori belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan SDM.	Kegiatan harus dilaksanakan baik yang mandatori maupun yang tidak mandatori karena berkaitan dengan persyaratan wajib untuk proses kegiatan tingkat pemda/kota

Megetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



**LARSITA, S.E., M.Sc.CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

IRBANWAS AKK



**Drs. E. HENY ASMORO, M.Si**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19671203 199203 1 007

**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SEKRETARIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris		
a	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
b	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
c	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Keterbatasan SDM yang menangani kepegawaian dan minimnya mengikuti pelatihan kepegawaian	Adanya Peraturan berkaitan dengan kepegawaian
d	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
e	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran
f	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Sekretaris	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (monev tindak lanjut)	Persen	94,5	25	50	75	94,5	Sekretaris		
a	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan (Urusan Sekretariat)	Persen	96	25	50	75	96	Sekretaris	Kurangnya pemahaman OPD dalam menindaklanjuti temuan	Keseriusan OPD dalam menindaklanjuti temuan
3	Meningkatnya kegiatan pendampingan dan asistensi kepada entitas	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi (Kebijakan teknis pengawasan)	Persen	72,5	63	66	69	72,5	Sekretaris		
a	Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	Persen	100	0	0	100	100	Sekretaris	Keterlambatan Penetapan peraturan terkait	Adanya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dari Pusat

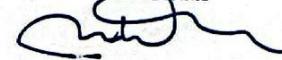
Mengetahui,

INSPEKTUR DAERAH,



LARSITA, S.E., M.Sc.CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

SEKRETARIS



DANIEL PRIYOWATORO, SE., MSI.  
Pembina Tk I  
NIP. 19710208 199803 1 010

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SUB. BAG. EVALUASI DAN PELAPORAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	20
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	12	3	6	9	12	KASUB.BAG . EVALAP	<p>1. Masih terdapat pimpinan OPD yang Komitmennya kurang untuk menindaklanjuti: Jika pimpinan atau pegawai tidak memiliki komitmen terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pelaksanaannya cenderung tidak efektif.</p> <p>2. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani tindak lanjut sehingga berpengaruh terhadap kecepatan obrik terhadap tindak lanjut hasil temuan/rekoemdasi</p> <p>4. Ketidapkahaman terhadap Rekomendasi: Tidak semua pihak memahami dengan baik rekomendasi hasil pemeriksaan, yang dapat menyebabkan tidak dilakukannya tindak lanjut dengan tepat.</p> <p>5. Resistance terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menghambat proses perbaikan.</p> <p>6. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu membuat proses tindak lanjut membutuhkan waktu yang lama</p>	<p>1. Komitmen Pimpinan: Dukungan dan komitmen dari pimpinan Instansi sangat penting. Pimpinan yang peduli dan aktif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan akan mendorong pegawai untuk melaksanakan rekoemdasi dengan baik;</p> <p>2. Sistem pengawasan internal yang baik : Adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dapat membantu memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara konsisten.</p> <p>3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam hal pemahaman terhadap hasil pemeriksaan dan cara menindaklanjutinya dapat memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>4. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta prosedur yang jelas, membuat proses menjadi lebih terarah dan terukur.</p> <p>5. Sistem Informasi yang Memadai: Penggunaan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi terkait hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas monitoring.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
2	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomen dasi	1	0	0	0	1	KASUB.BAG . EVALAP	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perencanaan pengawasan pemerintahan daerah yang diterbitkan diakhir tahun, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan pengawasan, karena Permendagri tersebut mengatur tentang arah kebijakan tahun berjalan</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya SDM yang memahami PPBR dapat menghambat kemampuan organisasi untuk merancang dan melaksanakan program kerja pengawasan secara optimal.</p>	<p>1. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung: Kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam bentuk Permendagri tentang Perencanaan Pengawasan Daerah yang memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan dapat menjadi pendorong bagi penyusunan program kerja.</p> <p>2. Pemahaman terhadap Risiko dan Tantangan: Identifikasi dan pemahaman yang baik terhadap risiko yang dihadapi organisasi memungkinkan penyusunan program kerja yang responsif dan berbasis risiko.</p> <p>3. Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk pegawai, manajemen, dan pihak eksternal (misalnya, auditor, mitra kerja), dapat memberikan perspektif yang beragam dan meningkatkan relevansi program kerja pengawasan.</p> <p>4. Analisis Kinerja Sebelumnya: Evaluasi dan analisis kinerja dari tahun-tahun sebelumnya bisa memberikan insight tentang area yang perlu diperbaiki dan fokus pengawasan ke depan.</p> <p>5. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan: Program pelatihan bagi para pengawas dan pejabat struktural untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik pengawasan berbasis risiko dapat berkontribusi dalam penyusunan program kerja yang efektif.</p>

Megetahui,

SEKRETARIS



DANIEL PRIYOWATORO, SE, MSI

Pembina Tk I  
NIP. 19710208 199803 1 010

KASUB.BAG .EVALAP



INDAH SRI PALUPI.SH.M.AP

Pembina  
NIP. 19730813 199803 2 005

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHANNYA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG**

UNIT KERJA: SUB. BAG. PROGRAM, KEUANGAN DAN UMUM KEPEGAWAIAN (PKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Inovatif</b>											
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2		1	2	2	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1			1	1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1			1	1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1				1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1			1	1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM	Adanya aturan yang mendukung
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2		1	2	2	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	30	30	30	30	30	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Sistem dari pusat sering terkendala
8	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	3	6	9	12	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
10	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1			1	1	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani keuangan dan minimnya mengikuti pelatihan keuangan	Adanya Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan
11	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2		1		2	KASUB.BAG . PKU	Keterbatasan SDM yang menangani kepegawaian dan minimnya mengikuti pelatihan kepegawaian	Adanya Peraturan berkaitan dengan kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Rencana / Target				Penanggung Jawab	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					Tri Wulan 1	Tri Wulan 2	Tri Wulan 3	Tri Wulan 4			
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	0	5	0	10	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
13	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
14	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
15	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
16	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Tertib administrasi
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran
19	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran
20	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	6	9	12	KASUB.BAG .PKU	Pemakaian tidak terdeteksi	Kejelasan dalam penentuan besarnya pengeluaran
21	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	7	7	7	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15	15	15	15	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan
23	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	3	0	0	0	3	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	32	8	16	24	32	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan
25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	0	0	1	KASUB.BAG .PKU	Keterbatasan Anggaran	Terdeteksinya BMD yang mendapat pemeliharaan

Mengetahui,

SEKRETARIS



DANIEL PRIYOWATORO, SE.,MSI

Pembina Tk I

NIP. 19710208 199803 1 010

KA.SUB.BAG .PKU



DIAN SEPTINA A. SE., M.Ec.Dev

Penata Tk I

NIP. 19870918 201001 2 019